

POLITIK PEMBERITAAN DALAM KASUS KORUPSI PETINGGI PARTAI POLITIK (Analisis Isi Berita Kasus Korupsi Luthfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, dan Ratu Atut Chosiyah pada Koran Tempo, Kompas, dan Republika)

Iswandi Syahputra

(Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

ABSTRACT

Corruption involving officials of political parties occurred during the year 2013 to get the most attention from the media. Among those cases, cases involving Anas Urbaningrum (Democrat Party), Lutfi Hasan Ishaq (Social Welfare Party), and Ratu Atut Choisyah (Golkar Party) gets more attention. Not only because of the amount of cases that involve him, but also with regard to their position in the party respectively.

The mass media has a point of view of each, which is called by the political news. Political news, consciously or not, the media made the construction of each in light of a case, including the reporting of corruption cases involving officials of political parties in Indonesia.

This study aimed to determine: (1) How the news media tendency toward corruption case involving three political party officials (Lutfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, and Ratu Atut Chosiyah)? And, (2) How the construction of reality that is built up of news about third parties which officials are involved in corruption cases?

By using the content analysis method, the results showed, in the third news media, Koran Tempo, Kompas, nor Republika, the news media about the third third corruption case involving the three leaders of political parties, if the terms of journalistic work procedures, it appears that elements of prominence become the main dish in the news. The three media have also made a good construction on the dangers of corruption, however, should be aware that the news media is not used for political purposes.

Keywords: Corruption, Political News, Content Analysis, Construct of Realty.

A. LATAR BELAKANG

Menjelang tahun 2014, arah politik mengerucut pada dua peristiwa politik besar, yakni pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Hajatan politik lima tahunan ini, tentu saja disambut partai politik (parpol) dengan

gempita. Berbagai persiapan dilakukan untuk menyambutnya, baik oleh parpol yang sudah lama berdiri (dan sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya), maupun oleh parpol baru yang akan mengikuti pemilu untuk pertama kalinya.

Akan tetapi, dinamika politik tak pernah berhenti di negeri ini. Selalu ada bahan untuk diberitakan, dan selalu ada kejutan. Perpindahan politisi dari satu partai ke partai lainnya banyak terjadi dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, meski pelakunya seringkali dilabeli sebagai 'politisi kutu loncat' berpindah untuk mendapatkan kesempatan dan kedudukan yang lebih baik dan lebih menguntungkan, meski dengan alasan kesamaan platform perjuangan sekalipun.

Beberapa politisi yang tetap setia dengan partainya sekalipun tak lepas dari sorotan. Berbagai kasus dialamatkan kepada mereka. Dan, sepanjang tahun 2013, berita dari para petinggi parpol terus berdatangan menghiasi kolom-kolom berita utama media nasional. Parpol-parpol dengan perolehan suara besar pada Pemilu 2014 dihadapkan pada kenyataan, adanya petinggi-petinggi mereka yang tersandung berbagai kasus besar. Kasus 'besar' bagi petinggi partai biasanya terkait dengan kasus korupsi, karena korupsi bukan hanya dianggap sebagai 'aib' bagi partai, tetapi juga bisa mengancam perolehan suara mereka pada pemilu yang sudah menunggu. Di sinilah gonjang-ganjing itu dimulai, partai berusaha untuk melepaskan diri dari aib yang dialamatkan kepadanya, entah dengan berusaha melindungi kadernya yang teribat, atau sebaliknya, berusaha melepaskan diri agar terkesan 'pro pemberantasan korupsi.' Di sisi lain, sorotan media terus meningkat.

Sepanjang kurun waktu tahun 2013, kasus-kasus korupsi yang melibatkan para petinggi parpol besar seolah tak pernah terputus. Satu kasus belum selesai, sudah muncul kasus yang lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja keras untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki daya sorot tinggi itu. Jika tidak, KPK akan terus dianggap sebagai lembaga penegak hukum yang pandang bulu dan terbang pilih. Tetapi, sejauh itu, KPK telah membuktikan, tak ada satupun orang di negeri ini yang kebal hukum, bahkan para petinggi parpol sekalipun yang sangat dekat dengan kekuasaan.

Banyak kasus korupsi yang melibatkan para petinggi parpol selama tahun 2013, termasuk 'warisan' kasus-kasus di tahun sebelumnya yang belum tuntas. Di antara sekian banyak kasus yang terjadi, ada tiga kasus korupsi yang melibatkan tiga petinggi partai besar yang menjadi sorotan publik selama tahun 2013, yakni; (1) Kasus korupsi proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor (dikenal sebagai kasus Hambalang) yang melibatkan Anas Urbaningrum, petinggi Partai Demokrat, (2), kasus korupsi impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan (3), kasus suap Pilkada Lebak dan kasus penyediaan sarana kesehatan yang melibatkan Ratu Atut Choisyah, Gubernur Banten yang juga petinggi Partai Golkar.

Kasus korupsi yang melibatkan kader dan petinggi parpol bukan hanya tiga kasus di atas, akan tetapi, tiga kasus di atas menyedot perhatian yang cukup besar dari masyarakat, terutama juga ditunjukkan dari besarnya sorotan media terhadap ketiga kasus tersebut.

Sebagai sebuah institusi bisnis, media dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus bisa menghidupi dirinya, yakni membayar berbagai jenis pengeluaran (biaya operasional, termasuk gaji karyawan), dan tentu saja mencari keuntungan. Ada dua sumber penghasilan utama media yang dikelola oleh swasta, yakni penghasilan dari langganan (penjualan langsung media kepada khalayak), dan pendapatan dari iklan. Sementara media yang dimiliki oleh institusi negara bisa mendapatkan pemasukan lain berupa subsidi.

Dalam hal media yang dikelola swasta yang tidak mendapatkan subsidi, seringkali pendapatan dari penjualan langsung media atau berlangganan, tidak bisa menutupi biaya operasional secara keseluruhan. Pada umumnya, media tidak membebaskan seluruh biaya operasional ke dalam produk media yang harus dibayar pelanggan, karena harga jual atau harga berlangganannya menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, media modern kemudian sangat mengandalkan penghasilan dari pemasukan iklan.

Pemasukan dari iklan inilah yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya operasional, memberi subsidi kepada pelanggan agar produk media lebih terjangkau khalayak, dan tentu saja untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, ada tiga pihak yang terlibat dalam lingkaran bisnis media, yakni media sebagai penyedia konten, khalayak sebagai konsumen konten, dan pengiklan. James Curran (2006) menyebut hubungan ini sebagai 'segitiga bisnis media' di mana masing-masing pihak mempengaruhi pihak lainnya. Media bekerja menyediakan konten untuk khalayak, khalayak yang berkumpul menjadi pasar bagi pengiklan, dan pengiklan menyediakan dana untuk menutupi biaya operasional media. Semakin baik konten media, akan semakin banyak khalayaknya, dan semakin banyak pula iklan yang masuk.

Meski tata kerja ketiga pihak tersebut saling melengkapi, semua tetap berasal dari upaya yang dilakukan media itu sendiri. Untuk membuat segitiga itu bekerja, media lah yang pertama kali harus bekerja untuk menyediakan konten yang akan menarik minat khalayak. Dalam upaya menyajikan konten ini, media harus memperhatikan konten yang bisa 'dijual' kepada khalayak. Dalam konteks konten media yang berupa berita media sudah lama mengenal apa yang disebut sebagai *news value* (nilai berita). *News value* adalah penggolongan jenis-jenis berita berdasarkan daya tarik dari berita itu sendiri. Semakin tinggi daya tarik beritanya, maka semakin tinggi minat khalayak untuk membacanya. Dan menurut Curran, hal ini jelas sangat terkait dengan upaya media untuk menghimpun khalayak sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya mendapatkan pengiklan.

Tidak ada rumusan baku mengenai *news value* ini. Intinya adalah, bagaimana media menyajikan sebuah berita yang dianggap akan menarik bagi khalayak. Meski demikian, dalam tata kerja jurnalisme, dikenal berbagai jenis nilai berita, antara lain:

1. *Magnitude*. Berita yang mengandung besaran peristiwa. Semakin besar kejadiannya, semakin menarik untuk khalayak.

Misalnya saja berita tentang pesawat jatuh yang menewaskan seluruh penumpangnya.

2. *Timeliness*. Berita yang mengandung nilai kesegaran atau kebaruan.
3. *Proximity*. Berita yang mengandung nilai kedekatan dengan khalayaknya, baik secara geografis maupun psikologis.
4. *Prominence*. Berita yang berkaitan dengan seseorang tokoh yang dikenal khalayak.
5. *Importance*. Berita yang memiliki nilai kepentingan yang besar.
6. *Impact atau Consequence*. Berita yang berkaitan dengan peristiwa yang memiliki konsekuensi luas bagi dirasakan khalayak.
7. *Conflict atau Controversy*. Berita yang mengandung konflik dan kontroversial.
8. *Sensation*. Berita yang mengandung sensasi atau menggemparkan.
9. *Novelty, Oddity, Unique, or the Unusual*. Berita yang menyangkut hal-hal baru, aneh, atau yang tak lazim atau tidak biasa.
10. *Human Interest*. Berita yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
11. *Sex and Crime*. Berita yang berkaitan dengan seksualitas dan kriminalitas.

Selain memperhatikan rumusan nilai berita di atas, media juga membuat berbagai klasifikasi berita sesuai dengan kebutuhan media, atau dengan memperhatikan kebutuhan khalayaknya, misalnya saja dengan membuat klasifikasi berita politik, berita ekonomi, berita olahraga, berita hiburan, dan sebagainya.

Dalam menyajikan berita yang layak 'dijual' media harus bisa memadukan antara klasifikasi berita dengan nilai berita yang kandungannya. Misalnya saja, berita politik seringkali menarik perhatian publik. Tetapi tidak semua berita politik bisa 'dijual' oleh karena itu berita politik harus memiliki daya tarik agar ia menarik khalayak. Berita politik akan menarik bila —misalnya—berkaitan dengan tokohnya yang terlibat korupsi dengan nilai besar (*magnitude*),

keputusan politik yang berdampak besar (*impact and consequence*), dan sebagainya.

Terkait dengan pemberitaan tiga kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai tadi, klasifikasi berita politik yang dilakukan media, bertemu dengan rumusan *news value* yang sudah dipaparkan di atas. Dengan kata lain, kasus korupsi yang melibatkan tiga petinggi partai besar tersebut ‘layak jual,’ dan karenanya tidaklah mengherankan jika sorotan media begitu tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat:

1. Bagaimana kecenderungan pemberitaan media terhadap kasus korupsi yang melibatkan tiga petinggi partai politik (Luthfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum, dan Ratu Atut Chosiyah)?
2. Bagaimana konstruksi realitas yang terbangun dari pemberitaan mengenai ketiga petinggi parpol yang terlibat kasus korupsi tersebut?

B. MEDIA, POLITIK PEMBERITAAN, DAN KONSTRUKSI REALITAS

Ada dua macam realitas, yaitu realitas sosial dan realitas media. Realitas sosial adalah segala sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal pemuatan sebuah realitas oleh media massa, tidak semua realitas sosial dapat dicakup. Media massa mempunyai keterbatasan waktu dan ruang. Selebar apa pun surat kabar, tetap tidak mungkin dapat memuat semua peristiwa yang terjadi. Realitas media adalah semua hal yang dimuat oleh media massa. Untuk pemuatannya, kita fahami beberapa kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, ada filter-filternya (termasuk melakukan *framing*). Apa yang dimuat oleh media massa hanyalah sebagian yang ada di tengah masyarakat.

Walter Lippmann mengatakan, pemuatan media itu seperti apa yang dicakup oleh sorotan lampu senter (*flashlight*). Bisa saja sorotan lampu senter tersebut berpridiah-pindah tapi tetap tidak mungkin dapat menyoroti seluruh permukaan masyarakat pada waktu yang sama.

Kejadian atau apa pun yang ada di tengah masyarakat mempunyai bangunan atau konstruksi sendiri. Bangunan pertama itu disebut realitas asli atau realitas pertama. Apa yang dimuat oleh media adalah realitas tiruan atau rekonstruksi atau realitas media atau realitas kedua. Rekonstruksinya sudah menggunakan tatanan tersendiri secara teknis yang tidak mungkin sama tepatnya dengan apa yang terjadi (realitas asli).

Dengan demikian, meski menurut kaidah jurnalisme dan nilai berita sudah memenuhi syarat, namun bila bahan berita itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan pemberitaan atau politik pemberitaan, maka tidak bisa ditindak-lanjuti. Walau bahan sudah menjadi berita, tinggal dicetak, bisa dibatalkan atau ditunda. Apa boleh buat, ketentuan teknis jurnalisme dapat secara praktis dikalahkan oleh kepentingan perusahaan. Di sini, teknis pemberitaan dapat dikalahkan oleh kepentingan bisnis.

Saringan teknis pertama dan kedua, sering dikalahkan oleh Politik Pemberitaan. Kedua saringan itu bersifat universal, secara teoritis berlaku di mana saja tapi dikalahkan oleh Politik Pemberitaan yang hanya berlaku intern di media masing-masing. Keberadaan Politik Pemberitaan secara praktis adalah sah. Ini adalah bagian yang disebut secara umum sebagai “kepentingan media” atau “ideologi media” dengan segala alasannya.

Dengan tanpa mengesampingkan bias teknis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Lang dan Lang (1953, dalam McQuail 2011B : 286) bahwa media membentuk realitas dengan cara yang seringkali dibentuk oleh kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Definisi-definisi yang dibentuk oleh media dominan, seringkali digunakan oleh khalayak untuk mendefinisikan sebuah realitas, hal ini akan lebih kuat jika didukung oleh kurangnya pengalaman pribadi individu pada masalah yang disajikan (Hartman dan Husband, 1974 dalam McQuail 2011B : 287).

Meskipun media seringkali bertindak tanpa bias yang disengaja, kecenderungan me-

reka yang diketahui mungkin dapat digunakan untuk tujuan manajemen berita. Kemudian, meski sebagian berita merupakan ‘bias yang tidak disadari’ dalam media, tetapi potensinya untuk mendefinisikan realitas seringkali dieksplotasi secara sengaja. Istilah ‘peristiwa semu’ (*pseudo event*) telah digunakan untuk merujuk pada kategori peristiwa yang kurang lebih dibuat untuk mendapatkan perhatian atau menciptakan kesan tertentu (Boorstin, 1961; McGinnis, 1969, dalam McQuail, 2011B : 287). Teknik penyajian peristiwa semu ini sekarang merupakan taktik yang akrab dalam banyak kampanye pemilihan (dan kampanye lainnya), tetapi yang lebih signifikan adalah kemungkinan bahwa persentase yang tinggi dari peliputan media mengenai ‘sifat aktual’ yang benar-benar membentuk peristiwa yang terencana yang ditujukan untuk membentuk kesan mendukung satu pihak ketimbang yang lain. Mereka yang mampu memanipulasi peliputan yang sesungguhnya adalah mereka yang paling berkuasa; sehingga bias, jika ada, dapat tidak disadari oleh media, tetapi tentunya tidak demikian bagi mereka yang mencoba membentuk ‘citra’ mereka sendiri (Molotch dan Lester, 1974, dalam McQuail, 2011B : 288).

C. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui kecenderungan arah pemberitaan media dalam menyoroti kasus korupsi yang melibatkan ketiga petinggi parpol tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Berelson & Kerlinger, menyatakan bahwa analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang nampak (Wimmer & Dominick, 2008:230). Sedangkan menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Kriyantono, 2007:229)

Oleh karena itu, maka analisis isi

mengacu pada prinsip :

1. Sistematis
Ada perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang dianalisis. Periset tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang sesuai dengan perhatian dan minatnya, tetapi harus pada keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diriset.
2. Objektif
Hasil analisis tergantung pada prosedur riset bukan pada orangnya. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka hasilnya harus sama, walaupun risetnya berbeda.
3. Kuantitatif
Mencatat nilai-nilai bilangan atau frekuensi untuk melukiskan berbagai jenis isi yang didefinisikan. Diartikan juga sebagai prinsip digunakannya metode deduktif.
4. Isi yang nyata
Yang diriset dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan makna yang dirasakan periset. Perkara hasil akhir dari analisis nanti menunjukkan adanya sesuatu yang tersembunyi, hal itu sah-sah saja. Namun semuanya bermula dari analisis yang nampak.

Fokus analisis isi dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kecenderungan dan arah pemberitaan dalam kasus korupsi yang melibatkan para petinggi parpol, termasuk di dalamnya tone (nada) pemberitaan, pemilihan narasumber, dan lain sebagainya.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Penetapan populasi dan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pemberitaan mengenai kasus korupsi petinggi parpol diambil dari tiga media cetak yang terbit secara nasional, yakni *Kompas*, *Koran Tempo*, dan *Republika*. Pemilihan ketiga media ini dilandaskan pada asumsi bahwa ketiga media

tersebut diedarkan secara nasional, tidak memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu, dan dianggap media yang telah menjalankan proses jurnalistik yang baik. Sedangkan sampel berita yang diambil dari masing-masing media adalah pemberitaan ketiga kasus korupsi petinggi parpol seminggu sebelum penetapan status tersangka, dan seminggu sesudahnya.

Dengan demikian, diperoleh sampel berita dalam rentang waktu sebagai berikut:

1. Berita kasus Luthfi Hasan Ishaq, tanggal 24 Januari-7 Februari 2013

2. Berita kasus Anas Urbaningrum, tanggal 15 Februari-1 Maret 2013
3. Berita kasus Ratu Atut Chosiyah, tanggal 10-24 Desember 2013

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk melihat kecenderungan arah pemberitaan kasus korupsi tiga petinggi parpol ini, akan dilakukan dengan melihat berbagai dimensi yang diturunkan dalam operasional penelitian. Hal ini dapat dilihat dalam **tabel 1** berikut:

Tabel. 1
Variabel, Dimensi, dan Operasionalisasi

Variabel	Dimensi	Operasionalisasi
Posisi Berita	Headline	Berita yang diposisikan sebagai berita utama dengan ciri ditampilkan di halaman depan dengan font yang besar, menunjuk-kan perhatian yang sangat tinggi dari media
	Subheadline	Berita yang diposisikan di bawah berita utama, bisa di halaman depan atau di halaman dalam utama, menunjukkan perhatian yang cukup tinggi dari media
	Berita Biasa	Berita yang diposisikan di halaman dalam dan tidak mencolok, menunjukkan adanya perhatian dari media meski tidak terlalu besar
	Highlight	Berita yang diposisikan di halaman khusus, menunjukkan adanya perhatian lebih dari media
Fokus Berita	Latar Belakang Perkembangan Kesaksian	Berita yang berkaitan dengan latar belakang kasus Berita yang berkaitan dengan perkembangan kasus Berita yang berkaitan dengan kesaksian orang lain terhadap kasus
	Fokus Lain	Berita lain yang masih berkaitan dengan kasus
Judul	Positif	Judul yang menguntungkan tersangka
	Netral	Judul yang netral
	Negatif	Judul yang tidak menguntungkan tersangka
Teras Berita	Positif	Teras yang menguntungkan tersangka
	Netral	Teras yang netral
	Negatif	Teras yang tidak menguntungkan tersangka
Sumber Teras	Cuplikan Berita	Teras yang diambil dari cuplikan berita
	Kutipan Tokoh	Teras yang diambil dari kutipan pernyataan
Narasumber	Positif	Narasumber yang menguntungkan tersangka
	Netral	Narasumber yang netral
	Negatif	Narasumber yang tidak menguntungkan tersangka
Komentar YBS	Ada	Adanya komentar dari tersangka
	Tidak	Tidak ada komentar dari tersangka
Diksi/Pilihan Kata	Labeling	Penjulukan tertentu pada tersangka
	Metafora	Penggunaan gaya bahasa tertentu pada tersangka
	Eufimisme/ Disfimisme	Penghalusan atau pengasaran bahasa terhadap tersangka

F. GAMBARAN UMUM PEMBERITAAN

1. Luthfi Hasan Ishaq

a. Koran Tempo

Secara kuantitas, pemberitaan *Tempo* tentang kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaq pascaditetapkannya Luthfi sebagai tersangka sangat luar biasa. Tercatat pada tanggal 1 Februari 2013, sehari setelah Luthfi resmi ditetapkan menjadi tersangka, sedikitnya terdapat delapan berita yang menyangkut kasus impor daging sapi Luthfi diterbitkan oleh *Tempo*. Berita tersebut membahas dari penetapan Luthfi sendiri, gonjang-ganjing di Partai Keadilan Sosial, sampai pada beberapa kabar yang beredar dan nama-nama yang diduga ikut tersangkut dalam kasus tersebut termasuk Menteri Pertanian Suswono.

Namun demikian, porsi terbesar terdapat pada pengebangkan kasus yang memberatkan Luthfi, dan berbagai kesulitan yang dihadapi PKS. Dalam berita *Tempo* PKS dinilai kehilangan lokomotif yang akan menghambat beberapa agenda internal PKS. Berita *Tempo* juga menyinggung tidak adanya kader PKS yang dinilai mampu menjadi penggerak pengganti Luthfi.

Pada pemberitaan-pemberitaan yang terbit setelahnya, *Tempo* kemudian nampak lebih terfokus pada berbagai gejolak yang terjadi di dalam tubuh PKS. Berita-berita yang diturunkan cenderung menyudutkan PKS dan seakan-akan menjadikan PKS sebagai bagian dari kasus yang menyeret presidennya itu. Hal ini diantaranya dapat dilihat dalam beberapa berita yang mengangkat judul *Ada Sapi di Plang PKS*, atau juga judul berita *PKS Diminta Introspeksi*. Di sela itu, *Tempo* memberitakan berbagai kemungkinan hukum dan berbagai temuan selama proses penyidikan. Namun berita tentang kisruh PKS nampak lebih dominan.

b. Kompas

Berita *Kompas* sepanjang 23 Januari sampai 7 Februari 2013, lebih terfokus pada bagaimana gerakan dan perkembangan Partai Keadilan Sosial (PKS) pasca penetapan Luthfi

Hasan Ishaq sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi. *Kompas* memuat berbagai gonjang-ganjing yang terjadi di internal partai itu, serta berbagai tekanan yang menjurus ke PKS berkaitan dengan ditetapkannya presiden PKS sebagai tersangka.

Kompas nampaknya tidak terlalu tertarik untuk memberitakan perkembangan hukum Luthfi. *Kompas* hanya memberitakan kabar-kabar yang keluar sepanjang proses hukum tersebut, seperti dugaan Luthfi memiliki kedekatan dengan Menteri Pertanian Suswono, sementara fokus berita masih cenderung membahas dampak yang dirasakan internal PKS.

Berita-berita yang diturunkan *Kompas* mengenai PKS tersebut diantaranya adalah, membedah internal partai dan kemelut yang terjadi di dalamnya pascapenetapan tersangka Luthfi; gerakan-gerakan PKS dalam menangani masalah internal tersebut; langkah-langkah yang diambil PKS untuk mempertahankan kader-kader partainya, dan; pembelaan PKS terhadap Luthfi, serta beberapa berita lain tentang PKS.

c. Republika

Koran *Republika* pada pemberitaan kasus suap impor daging sapi dengan tersangka presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, mengangkat berita yang lebih terfokus pada berbagai gerakan PKS dalam menangani kasus ini. *Republika* cenderung menerbitkan berita yang cukup menguntungkan pihak Luthfi dan PKS. *Republika* tidak nampak membeberkan kasus Luthfi sebagai borok PKS, namun lebih pada bagaimana mengungkap fakta tentang Luthfi terutama langkah maju yang dilakukan PKS dalam enanggapi kasus itu.

Terlihat, sejak kasus Luthfi memanas *Republika* tidak serta-merta memuat pemberitaan tentang penetapan Luthfi sebagai tersangka oleh KPK. Akan tetapi *Republika* justru banyak menaikkan berita tentang berbagai pembelaan oleh PKS seperti berita dengan judul *PKS Investigasi Kasus Luthfi* yang dimuat tanggal 4 Februari 2013. Selin itu, *Republika* beberapa kali dalam beritanya juga mempertanyakan kinerja KPK dalam

kasus Luhfi. Beberapa berita seperti berita lain yang dimuat tanggal 4 Februari 2013 dengan judul *KPK Bermain Petak Umpet*, menunjukkan keraguan terhadap badan hukum yang memegang kuasa atas kasus Luthfi tersebut.

2. Anas Urbaningrum

a. Koran Tempo

Sepanjang tanggal 15 februari sampai tanggal 1 maret, satu pekan sebelum dan sesudah pimpinan tertinggi Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana proyek Hambalang pada tanggal 22 Februari, koran *Tempo* tercatat telah menaikkan beberapa berita mengenai perkembangan kasus Hambalang yang menyangkut Anas dengan intensitas yang cukup padat. Data menunjukkan *Tempo* memuat berita tentang Anas dan kaitannya dengan proyek Hambalang rata-rata antara satu sampai tiga berita perhari, dengan berbagai sudut, antara lain perkembangan status Anas itu sendiri, juga dengan partai yang ia ketuai.

Pada berita-berita *Tempo* yang turun sepekan sebelum penetapan Anas sebagai tersangka, yakni sejak tanggal 15 Februari hingga 21 Februari, memiliki dua kecenderungan yang berbeda, yakni berita bernada “dukungan” kepada Anas, dan “pemberatan” terhadap posisi petinggi Partai Demokrat itu.

Tanggal 15 Februari sampai dengan 18 Februari, *Tempo* banyak menurunkan berita yang memberatkan posisi Anas. Ini dapat dilihat dari salah satu judul *Tempo* tanggal 16 yang menulis *Penentuan Status Anas Harus Dipercepat*.

Sementara itu, tiga hari sebelum anas ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 21 Februari, beberapa berita *Tempo* beralih pada nada yang cenderung menguntungkan Anas, seperti berita yang berjudul *Posisi Anas Masih Kuat*.

Pasca penetapan Anas sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang, berita *Tempo* kemudian cenderung mengangkat berita yang mengarah pada perkembangan kasus. Berita-berita yang naik setelah tanggal 22 Februari

hingga tanggal 1 Maret, lebih mengarah pada berbagai kemungkinan hukum yang bisa dibebankan kepada Anas, berbagai lembaga yang terpengaruh oleh penangkapan Anas terutama Partai Demokrat, serta serang-bantah antara Anas dan berbagai tuduhan yang dilyangkan beberapa pihak kepadanya.

b. Kompas

Dalam harian *Kompas*, pemberitaan kasus Hambalang yang melibatkan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepekan sebelum dan setelah ditetapkannya Anas sebagai tersangka, yakni dari tanggal 15 Februari 2013 hingga 1 Maret 2013, tercatat tidak menerbitkan berita Anas dengan frekuensi yang berlebih. Porsi berita mengenai Anas dan kasus Hambalang masih dalam batas frekwensi yang cukup seimbang. Sepanjang periode ini Kompas menurunkan satu sampai tiga berita perhari.

Sepekan sebelum anas ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Februari 2013, Kompas memuat beberapa berita terkait Hambalang, namun sepanjang periode itu *Kompas* belum menyebut-nyebut nama Anas secara langsung, kendati di beberapa media lain seperti *Tempo* telah dengan sangat terbuka menyebutkan Anas seakan-akan telah benar-benar menjadi tersangka.

Berita-berita Kompas yang turun periode 15-21 Februari terkait Hambalang hanya tercatat satu kali menyebut nama Anas dalam judul beritanya, yakni pada berita berjudul *KPK Belum Putus Anas (19/02/13)*. Akan tetapi dalam berita ini Anas cenderung diuntungkan. Berita ini memuat dua komentar dari Johan Budi, dan pengacara Anas sendiri, Patra M. Dalam komentarnya Johan cenderung netral, sementara pengacara Anas memberikan komentar positif, sehingga posisi Anas mendapat keuntungan pada berita ini.

c. Republika

Dalam pemberitaan *Republika* terkait kasus Hambalang yang menyeret ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, *Republika* dapat

dikatakan berada posisi yang cukup netral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya intensitas berita *Republika* yang masih wajar, yakni antara satu hingga dua berita yang juga tidak diterbitkan setiap hari.

Selain itu, porsi pemberitaan kasus Hambalang dan Anas, dalam beberapa berita, justru dinilai menguntungkan posisi Anas. Sebagai misal berita yang diturunkan *Republika* tanggal 25 Februari 2013 yang berjudul *Menunggu Anas Keluarkan Kartu Truf*, nampak menempatkan Anas sebagai sosok yang memiliki nilai tawar. Selain itu, berita lain berjudul *Anas Tersangka Masa HMI Demo*, menunjukkan adanya kelompok loyalis yang cukup mengkar di belakang Anas.

Dari keseluruhan berita yang terbit di koran *Republika*, hampir tidak ada nada yang menyudutkan posisi Anas dalam kasus Hambalang, kecuali sebuah satemen dari Ulil menyebutkan Anas sebagai “Bai yang Tidak diinginkan”, yang kemudian diangkat sebagai judul sebuah berita. Selebihnya, *Republika* memberitakan Anas dan Hambalang pada jarak yang cukup netral, tanpa dikaitkan Partai Demokrat dan lembaga-lembaga lain yang pernah disinggahi Anas.

3. Ratu Atut Chosiyah

a. Koran Tempo

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah seminggu sebelum penetapan dirinya sebagai tersangka pada 17 Desember 2013, tercaat tidak terlalu menyita perhatian *Tempo*. Sepanjang tanggal 10-16 Desember, *Tempo* hanya memuat empat berita yang diterbitkan pada tanggal 11-13 Desember 2013. Selebihnya, tidak ditemukan berita mengenai Atut. Atut heboh dalam pemberitaan *Tempo* sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanggal 17 Desember 2013 terkait sengketa Pilkada Lebak.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, intensitas pemberitaan tentang Atut melonjak drastis. Tercatat sejak tanggal 18-24 Desember 2013, *Tempo* menaikkan rata-rata tiga sampai lima berita dalam sehari yang berkaitan dengan

kasus Atut. Bisa dikatakan semua berita yang dimuat *Tempo* menyudutkan posisi Atut. Yang paling menghebohkan pada tanggal 18 Desember 2013 *Tempo* memuat judul *Runtuhnya Dinasti Atut* di halaman depan.

Pada perkembangan selanjutnya, berita *Tempo* semua mengarah pada berbagai kasus Atut dan berbagai konsekuensi hukum yang akan dibebankan pada Atut. Pada beberapa berita, *Tempo* juga menyinggung kaitannya penangkapan Atut dan Partai Golkar. *Tempo* menyebut-nyebut penangkapan Atut sebagai *Benteng Golkar di Pulau Jawa Terancam*.

Berita *Tempo* tentang Atut juga kemudian melebar ke berbagai arah. Sepekan setelah penempatan Atut sebagai tersangka, *Tempo* berangsur-angsur memuat berita yang mengarah pada beberapa kasus, diantaranya Atut menjadi tangan utama yang menyalurkan uang suap kepada Mahkamah Konstitusi.

Selain itu *Tempo* beberapa kali juga mengangkat berita yang berisi menyudutkan semua posisi keluarga Atut, bukan hanya Atut saja. Hal ini nampak pada beberapa judul berita, terutama berita pertama setelah Atut menjadi tersangka yang menyinggung adanya dinasti politik Atut di Banten.

Beberapa berita lain tentang dinasti Atut, dapat pula dilihat di beberapa edisi, yang salah satunya mengangkat judul *Atut Siapkan Putera Sulungnya sebagai Peimpin Dinasti Politik*. Selain itu, berita *Tempo* kemudian juga melebar ke berbagai kemungkinan hukum Atut, termasuk beberapa tuduhan lain seperti pencucian uang.

Di luar proses hukum Atut, berita lain yang juga cukup sering diterbitkan adalah munculnya ketegangan antara Atut dan wakilnya, Rano Karno. Rano Karno beberapa kali diberitakan sebagai orang yang kontra dengan Atut. Salah satu berita juga menyebut-nyebut Rano diancam dijegal oleh loyalis Atut.

b. Kompas

Dalam pemberitaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap Pilkada Lebak

tanggal 17 Desember 2013, *Kompas* lebih sering menaikkan berita yang cukup netral. Namun demikian, dalam beberapa berita yang dimuat Kompas nampak pula beberapa berita yang benada profokatif dan menyudutkan posisi Atut. Sebagaimana berita tanggal 21 dengan judul *Dinasti Atut Benar-benar Runtuh*, memuat berita yang menyangkut beberapa orang dekat Atut ke dalam kasus-kasusnya. Kompas juga sempat menyinggung reaksi Partai Golkar atas penetapan Atut sebagai tersangka. Namun sepanjang ini tidak nampak adanya penyudutan pada posisi Golkar dalam kasus Atut. Sepanjang satu pekan sebelum dan sesudah ditetapkannya Atut menjadi tersangka, *Kompas* tidak tercatat menaikkan frekwensi berita tentang Atut. Pemberitaan Atut dimuat dalam intensitas yang cukup wajar, yakni rata-rata antara satu hingga tiga berita perhari. Dalam beberapa hari Kompas juga tercatat tidak menayangkan berita tentang Atut samasekali.

c. *Republika*

Berita *Republika* terkait kasus suap Pilkada Lebak yang menyeret gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, memiliki kecenderungan yang sedikit menyudutkan posisi Atut sebagai tersangka. Dilihat dari pemberitaan yang dimuat di *Republika*, mengait-ngaitkan antara kasus Atut, termasuk hubungannya dengan Partai Golkar.

Republika banyak memberitakan beberapa gambaran Banten yang disebut-sebut telah menjadi wilayah yang cukup korup, dimana korupsi merajalela di kalangan pejabat pemerintahannya. Hanya saja, pada pemberitaan *Republika* posisi penyudutan terhadap Atut dan Golkar khususnya tidak dinyatakan secara nyata. Berita dan judul yang dimuat *Republika* cenderung samar, seperti berita berjudul *Dana Atut Bisa ke Parpol* yang diuat tanggal 19 desember 2013, menunjukkan adanya hubungan antara partai dimana Atut bernaung (Golkar) serta kemana uang Atut bermuara. Dalam berita ini tidak dikatakan secara jelas apakah ada dana dari Atut yang mengalir ke Partai Golkar. Hari berikutnya,

20 Desember 2013, baru kemudian Golkar disebut-sebut dalam kasus Atut dalam berita yang memuat judul *Kasus Atut Pengarubi Golkar*.

G. TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Luthfi Hasan Ishaq

a. *Koran Tempo*

Luthfi Hasan Ishaq (Luthfi), Presiden PKS dijadikan tersangka dalam kasus suap impor daging sapi pada 30 Januari 2013. Beritanya turun di *Koran Tempo* (*Tempo*) edisi 31 Januari 2013 dengan judul “*Presiden PKS Tersangka Suap Rp. 1 Milyar*” di halaman depan, disusul beberapa berita lainnya di halaman dalam. *Tempo* menyorot kasus ini dalam laporan khusus dengan judul “*Skandal Suap Guncang PKS*.” Awal pemberitaan, berita yang diturunkan berupa kronologi penetapan status tersangka Luthfi yang dimulai dari penangkapan Ahmad Fathanah yang disebut KPK memiliki hubungan dengan Luthfi sehari sebelumnya. *Tempo* juga menyoroti kemungkinan keterkaitan Luthfi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono yang juga kader PKS dengan dasar hubungan telpon dengan Luthfi. Meski demikian, fokus berita masih pada status tersangka Luthfi yang masih menjabat sebagai Presiden PKS. Berita hari pertama juga diimbangi dengan ketidakpercayaan kader PKS akan keterlibatan Luthfi.

Kasus Luthfi seolah tidak tercium media sebelumnya, oleh karena itu, seminggu sebelum penetapan status hukum Luthfi, beritanya tak muncul di media. Kasus Luthfi ramai diberitakan setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Halaman utama *Tempo* banyak menyoroti kasus baru yang mengejutkan ini. Awal pemberitaan, *Tempo* menyoroti peristiwa ini secara kronologis mulai dari penetapan status tersangka dan bukti-bukti yang memberatkan Luthfi, kemudian disusul dengan berita-berita yang mengaitkannya dengan Mentan Suswono. Fokus pemberitaan kemudian juga meluas dengan implikasi status Luthfi terhadap PKS yang ditulis dalam berita berjudul “*PKS Diprediksi Akan Lakukan ‘Politik Amputasi’*” yang disusul

dengan kabar penggantian Luthfi oleh Anis Matta sebagai Presiden PKS. Secara kuantitas, pemberitaan *Tempo* tentang kasus ini cukup tinggi. Sehari setelah penetapan status Luthfi, *Tempo* menurunkannya dalam empat judul berita. Jumlah ini meningkat setelahnya, misalnya saja pada edisi 1 Februari 2013, tercatat delapan berita terkait.

Pada pemberitaan-pemberitaan setelahnya, *Tempo* kemudian nampak lebih terfokus pada berbagai gejolak yang terjadi di dalam tubuh PKS. Berita-berita yang diturunkan cenderung menyudutkan PKS dan seakan-akan menjadikan PKS sebagai bagian dari kasus yang menyeret presidennya itu. Hal ini dintaranya dapat dilihat dalam beberapa berita yang mengangkat judul *Ada Sapi di Plang PKS*, atau juga judul berita *PKS Diminta Introspeksi*. Di sela itu, *Tempo* memberitakan berbagai kemungkinan hukum dan berbagai temuan selama proses penyidikan. Namun berita tentang kisruh PKS nampak lebih dominan.

Selain itu, *Tempo* juga menyajikan ‘bumbu’ lain dalam pemberitaan kasus ini, misalnya berita-berita mengenai sosok Luthfi di kampung halamannya di Malang yang sering berderma dan membangun masjid, atau berita tentang ‘wanita seksi’ yang ditangkap bersama Ahmad Fathanah yang menjadi pembuka penetapan status Luthfi.

Secara keseluruhan, ditemukan 31 berita yang berkaitan dengan kasus Luthfi di *Koran Tempo*. Posisi berita Luthfi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2
Posisi Berita Luthfi di Koran Tempo

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
6	0	18	7

Sedangkan fokus pemberitaan kasus Luthfi di *Koran Tempo* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3
Fokus Berita Luthfi di Koran Tempo

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
6	0	18	7

Nada pemberitaan (*tone*) berita-berita yang diturunkan *Tempo* didominasi oleh *tone* yang bukan hanya memberatkan LUTHFI, tetapi juga cenderung memojokkan PKS. Hal ini sepias bisa terlihat dari pemilihan judul dan teras berita (*lead*). Misalnya saja judul-judul seperti “*KPK Punya Bukti Permainan Luthfi*” (1/2/13), “*Menteri Pertanian Bisa Terseret*” (1/2/13), “*Luthfi Hasan Diduga Beri Perintah Ambil Suap*” (3/2/13), atau “*PKS Diprediksi Akan Lakukan Politik Amputasi*” (1/2/13).

Tabel. 4
Tone Pemberitaan Luthfi di Koran Tempo

Positif	Negatif	Netral
1	16	14

Dalam hal pemilihan narasumber, *Tempo* banyak mengambil dari pihak KPK, dan beberapa pihak terkait seperti Mantan Suswono, juga Luthfi sendiri. Dalam hal pemberitaan kasus, *Tempo* juga banyak memuat keterangan dari sumber anonim seperti ‘sumber *Tempo* di KPK’ yang cenderung memberatkan Luthfi, kader-kader PKS yang berkomentar tentang masa depan partainya terkait status Luthfi dan penggantinya Anis Matta, hingga narasumber dari kalangan warga yang tidak terlalu relevan dengan perkembangan kasus hukum Luthfi seperti warga di sekitar rumah Luthfi di Malang yang ditanyai asal-usul dana Luthfi saat berderma dan membangun masjid.

Tabel. 5
Tone Narasumber Berita Luthfi di Koran Tempo

Positif	Negatif	Netral
15	84	21

b. Kompas

Seperti halnya pada pemberitaan kasus Luthfi di *Tempo*, harian *Kompas* juga banyak memberitakan kasus Luthfi setelah penetapannya sebagai tersangka. Sebelum ditetapkannya Luthfi sebagai tersangka pada 31 Januari 2013, kolom berita Kompas masih belum ditemukan menyinggung-nyinggung kasus suap impor daging sapi. Kompas tercatat menaikkan berita Luthfi yang dengan langsung menyinggung PKS

pada tanggal 2 Februari 2013 dengan judul yang cenderung menyudutkan Partai Keadilan Sejahtera yang dipresideni Luhtfi dengan judul *PKS 2014 Tergantung Proses Hukum Luhtfi*. Berita ini, menjelaskan kronologis bagaimana kronologis kasus hingga proses hukum terbaru yang dikenakan pada Luhtfi, serta banyak menyinggung nasib PKS terutama pada agenda politik 2014 PKS yang dinilai kaan gagal dengan ditangkanya Luhtfi oleh KPK.

Selama periode penelitian, ditemukan 9 berita yang berkaitan dengan kasus Luhtfi di *Kompas*. Posisi berita Luhtfi di *Kompas* bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 6
Posisi Berita Luhtfi di Kompas

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
2	0	4	3

Sedangkan fokus pemberitaan Luhtfi di *Kompas* bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 7
Fokus Berita Luhtfi di Kompas

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
0	4	0	5

Secara umum, berita *Kompas* sepanjang 23 Januari sampai 7 Februari 2013, sepekan sebelum dan sesudah Luhtfi ditetapkan menjadi tersangka, lebih terfokus pada bagaimana gerakan dan perkembangan Partai Keadilan Sosial (PKS) terutama pasca penetapan Luhtfi sebagai tersangka kasus suap impor daging sapi. *Kompas* memuat berbagai gonjang-ganjing yang terjadi di internal partai itu, serta berbagai tekanan yang menjerus ke PKS berkaitan dengan ditetapkannya presiden PKS sebagai tersangka.

Kompas cenderung tidak terlalu tertarik untuk memberitakan perkembangan hukum Luhtfi. *Kompas* hanya memberitakan kabar-kabar yang keluar sepanjang proses hukum tersebut, seperti dugaan Luhtfi emiliki kedekatan dengan Menteri Pertanian Suswono, dan menyinggung sedikit isu lain seputar orang dekat Luhtfi. Sementara fokus berita masih cenderung membahas dampak yang dirasakan internal PKS.

Hal ini terlihat dari berita-berita yang diturunkan *Kompas* mengenai PKS yang diantaranya membedah internal partai dan kemelut yang terjadi di dalamnya pascapenetapan tersangka Luhtfi; gerakan-gerakan PKS dalam menangani masalah internal tersebut; langkah-langkah yang diabil PKS untuk mempertahankan kader-kader partainya, dan; pembelaan PKS terhadap Luhtfi, serta beberapa berita lain tentang PKS.

Namun demikian nada berita yang dimuat di *Kompas*, tidak secara langsung mengadili kasus yang terjadi terhadap presiden PKS itu. Tidak banyak ditemukan diksi-diksi negatif yang membratkan pihak Luhtfi dan PKS. Berita yang banyak dimuat adalah beberapa agenda konsolidasi dan terkait program PKS di 2014 yang pasti terganggu, serta beberapa pembelaan dari pihak PKS.

Tone berita *Kompas*, bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 8
Tone Berita Luhtfi di Kompas

Positif	Negatif	Netral
0	5	4

Sedangkan Tone narasumber yang dipilih *Kompas* dalam berita Luhtfi bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel. 9
Tone Narasumber Berita Luhtfi di Kompas

Positif	Negatif	Netral
4	18	7

c. *Republika*

Republika pada pemberitaan kasus suap impor daging sapi dengan tersangka presiden PKS Luhtfi Hasan Ishaq, sama seperti *Tempo* dan *Kompas*, sebelum penetapan Luhtfi sebagai tersangka pada 31 Januari 2013, tidak ditemukan menerbitkan berita yang menyinggung Luhtfi. Berita yang dimuat *Republika* pada tanggal 3 Februari 2013 justru memuat pembelaan Luhtfi pada kasus suap daging impor dengan berita yang berjudul *Luhtfi Mengaku Tak Tahu (3/02/13)*. Selebihnya, *Republika* banyak

mengangkat berita yang lebih terfokus pada berbagai gerakan PKS dalam menangani kasus ini.

Selama periode penelitian, ditemukan 10 berita tentang Luthfi di *Republika*. Posisi penempatan berita Luthfi bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 10
Posisi Berita Luthfi di *Republika*

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
1	0	9	0

Sementara fokus pemberitaan kasus Luthfi di *Republika* bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 11
Fokus Berita Luthfi di *Republika*

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
0	4	2	4

Republika cenderung menerbitkan berita yang cukup menguntungkan pihak Luthfi dan PKS. *Republika* tidak nampak membeberkan kasus Luthfi sebagai borok PKS, namun lebih pada bagaimana mengungkap fakta tentang Luthfi terutama langkah maju yang dilakukan PKS dalam menanggapi kasus itu.

Terlihat, sejak kasus Luthfi mengemuka *Republika* tidak serta-merta memuat pemberitaan tentang penetapan Luthfi sebagai tersangka oleh KPK. Akan tetapi *Republika* justru banyak menaikkan berita tentang berbagai pembelaan oleh PKS seperti berita dengan judul *PKS Investigasi Kasus Luthfi (5/02/13)* yang dimuat tanggal 4 Februari 2013. Selain itu, *Republika* beberapa kali dalam beritanya juga mempertanyakan kinerja KPK dalam kasus Luthfi. Beberapa berita seperti berita lain yang dimuat tanggal 4 Februari 2013 dengan judul *KPK Bermain Petak Umpet (4/02/13)*, menunjukkan keraguan terhadap badan hukum yang memegang kuasa atas kasus Luthfi tersebut.

Dalam pemberitaan *Republika* tidak ditemukan adanya nada pemberitaan yang membeberatkan Luthfi. Berita ditulis dengan sikap yang cukup netral, dengan narasumber dari berbagai

lembaga yang juga memberi komentar-komentar yang cukup netral. Tone berita mengenai kasus Luthfi bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4
Tone Berita Luthfi di *Republika*

Positif	Negatif	Netral
3	4	3

Sedangkan tone narasumber yang dipilih *Republika* dalam kasus Luthfi, bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 5
Tone Narasumber Berita Luthfi di *Republika*

Positif	Negatif	Netral
5	23	3

2. Anas Urbaningrum

a. *Koran Tempo*

Kasus Anas Urbaningrum terkait korupsi Hambalang sebenarnya telah lama mengisi kolom berita *Koran Tempo*. Tercatat setidaknya berita mengenai Anas telah bergulir sejak tahun 2011 ketika bekas bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin menyebut-nyebut Anas dalam kasus Hambalang. Proses sejak awal nama Anas disebut hingga Anas resmi diumumkan sebagai tersangka memakan waktu kurang lebih dua tahun.

Sepekan sebelum Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tanggal 22 Februari 2013, *Tempo* telah rutin menaikkan perkembangan terbaru terkait Anas, terutama ketika ditemukan adanya bocoran Surat Perintah Penyidikan KPK yang ditujukan kepada Anas. Pasca kejadian itu *Tempo* hampir setiap hari menaikkan berita tentang Anas terkait kasus Hambalang di halaman utama.

Sepanjang tanggal 15 Februari sampai tanggal 1 Maret, satu pekan sebelum dan sesudah pimpinan tertinggi Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana proyek Hambalang pada tanggal 22 Februari, *Koran Tempo* tercatat telah menaikkan beberapa berita mengenai perkembangan kasus Hambalang yang menyangkut Anas dengan intensitas

yag cukup padat. Data menunjukkan Tempo memuat berita tentang Anas dan kaitannya dengan proyek Hambalang rata-rata antara satu sampai tiga berita perhari, dengan berbagai sudut, antara lain perkembangan status Anas itu sendiri, juga dengan partai yang ia ketuai.

Sepanjang periode 15 Februari hingga 1 Maret 2013, *Koran Tempo* menurunkan 29 berita terkait dengan kasus Anas. Sebaran posisi beritanya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 14
Posisi Berita Anas di Koran Tempo

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
12	0	17	0

Sementara fokus pemberitaannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 15
Fokus Berita Anas di Koran Tempo

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
1	14	7	7

Pada berita-berita *Tempo* yang turun sepekan sebelum penetapan Anas sebagai tersangka, yakni sejak tanggal 15 Februari hingga 21 Februari, memiliki dua kecenderungan yang berbeda, yakni berita bernada “dukungan” kepada Anas, dan “pemberatan” terhadap posisi petinggi Partai Demokrat itu. Tanggal 15 Februari sampai dengan 18 Februari, secara berturut-turut tempo seakan-akan mendesak percepatan pada penanganan kasus Anas, hal ini dapat dilihat pada beberapa berita terbitan *Tempo* yang antara lain berjudul *Penanganan Kasus Anas Dinilai Mundur* (15/02/13); *Nasib Anas Ditentukan Selambatnya Besok* (18/02/13), dan; *Penentuan Status Anas Harus Dipercepat* (16/02/13).

Sementara itu, tiga hari sebeum anas ditetapkan sebagai tersangka. Yakni dari tanggal 19 Februari sampai tanggal 21 Februari, beberapa berita *Tempo* beralih pada nada yang cenderung menguntungkan Anas, seperti berita yang berjudul *Posisi Anas Masih Kuat* (19/02/13).

Pasca penetapan Anas sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang, berita *Tempo*

kemudian cenderung mengangkat berita yang mengarah pada perkembangan kasus. Berita-berita yang naik setelah tanggal 22 Februari hingga tanggal 1 Maret, lebih mengarah pada berbagai kemungkinan hukum yang bisa dibebankan kepada Anas, berbagai lembaga yang terpengaruh oleh penangkapan Anas terutama Partai Demokrat, serta serang-bantah antara Anas dan berbaagai tuduhan yang dilayangkan beberapa pihak kepadanya.

Tabel. 16
Tone Berita Anas di Koran Tempo

Positif	Negatif	Netral
3	6	20

Dalam pemberitaan-pemberitaan ini, juga terjadi pergantian nada pemberitaan. Namun demikian, posisi Anas cenderung lebih sering disudutkan. Hal ini terutama dalam berita-berita *Tempo* yang memasukkan sumber anonim dengan identitas ‘Sumber *Tempo* di KPK’ yang dalam komentar-komentarnya banyak membe-ratkan posisi anas. Pemberatan lain pada Anas juga kemudian muncul dari beberapa orang Demokrat sendiri, yang memunculkan berbagai statemen tentang kinerja anas di Partai Demokrat selama ini yang dianggap tidak banyak mem-bawa perubahan.

Tabel. 17
Tone Narasumber Berita Anas di Koran Tempo

Positif	Negatif	Netral
19	54	41

b. Kompas

Dalam harian *Kompas*, pemberitaan kasus Hambalang yang melibatkan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepekan sebelum dan setelah ditetapkannya Anas sebagai tersangka, yakni dari tanggal 15 Februari 2013 hingga 1 Maret 2013, tercatat tidak menerbitkan berita Anas dengan frekuensi yang berlebih. Porsi berita mengenai Anas dan kasus Hambalang masih dalam batas frekwensi yang cukup seimbang. Sepanjang periode ini Kompas menurunkan satu sampai tiga berita perhari.

Sepekan sebelum Anas ditetapkan

sebagai tersangka pada tanggal 22 Februari 2013, *Kompas* memuat beberapa berita terkait Hambalang, namun sepanjang periode itu *Kompas* belum menyebut-nyebut nama Anas secara langsung, kendati di beberapa media lain seperti Tempo telah dengan sangat terbuka menyebut Anas seakan-akan telah benar-benar menjadi tersangka.

Sepanjang periode penelitian, ditemukan 14 berita mengenai kasus Anas di *Kompas*, dengan penempatan berita sebagai berikut:

Tabel. 18
Posisi Berita Anas di Kompas

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
4	0	10	0

Fokus pemberitaan *Kompas* dalam kasus Anas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 19
Fokus Berita Anas di Kompas

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
2	7	0	5

Berita-berita *Kompas* yang turun periode 15-21 Februari terkait Hambalang hanya tercatat satu kali menyebut nama Anas dalam judul beritanya, yakni pada berita berjudul *KPK Belum Putus Anas (19/02/13)*. Akan tetapi dalam berita ini Anas cenderung diuntungkan. Berita ini memuat dua komentar dari Johan Budi, dan pengacara Anas sendiri, Patra M. Dalam komentarnya Johan cenderung netral, sementara pengacara Anas memberikan komentar positif, sehingga posisi Anas mendapat keuntungan pada berita ini.

Dari segi isi, *Kompas* cenderung membeberkan bagaimana kronologi kasus tersebut terjadi, disertai beberapa perkembangan proses hukum Anas. Tidak ditemukan berita-berita yang menyudutkan Anas. Namun demikian, dalam beberapa berita disinggung pula gejolak yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat pasca ditetapkannya Anas sebagai tersangka.

Tabel. 20
Tone Berita Anas di Kompas

Positif	Negatif	Netral
4	5	5

Tabel. 21
Tone Narasumber Berita Anas di Kompas

Positif	Negatif	Netral
14	31	12

c. *Republika*

Selama periode penelitian, ditemukan 14 berita yang diturunkan *Republika* berkaitan dengan kasus Anas. Berita-berita itu tersebar dalam posisi sebagai berikut:

Tabel. 22
Posisi Berita Anas di *Republika*

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
2	1	11	0

Sementara, fokus *Republika* dalam kasus Anas terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 23
Fokus Berita Anas di *Republika*

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
1	5	2	6

Dalam pemberitaan *Republika* terkait kasus Hambalang yang menyeret keuta Partai Demokrat Anas Urbaningrum, *Republika* dapat dikatakan berada posisi yang cukup netral. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya intensitas berita *Republika* yang masih wajar. Tercatat sepanjang tanggal 15-21 Februari *Republika* tidak setiap hari memuat berita terkait Anas, dan terhitung hanya menurunkan beberapa berita terkait.

Selain itu, porsi pemberitaan kasus Hambalang dan Anas, dalam beberapa berita, cenderung menguntungkan posisi Anas. Sebagai misal berita yang diturunkan *Republika* tanggal 25 Februari 2013 yang berjudul *Menunggu Anas Keluarkan Kartu Truf (25/02/13)*, nampak menempatkan Anas sebagai sosok yang memiliki nilai tawar pada kasus ini. Pada berita-berita yang dimuat sebelumnya, *Republika* nampak menampilkan beberapa komentar beberapa orang yang bernada dukungan pada Anas. Seperti narasumber Saiful Umam dalam berita berjudul *Anas Teken Pakta (15/02/13)* yang menyebut-nyebut Anas sebagai politisi yang memiliki

nilai tawar lebih dibanding dengan politisi Partai Demokrat lainnya. Selain itu, berita lain berjudul *Anas Tersangka, Masa HMI Demo (27/02/13)*, menunjukkan adanya kelompok loyalis yang cukup mengakar di belakang Anas.

Tabel. 24
Tone Berita Anas di Republika

Positif	Negatif	Netral
5	5	4

Dari keseluruhan berita yang terbit di koran *Republika*, memang hampir tidak ada nada yang menyudutkan posisi Anas dalam kasus Hambalang, kecuali sebuah pernyataan dari narasumber Ulil Absar abdala yang menyebut anas sebaga “Bayi yang Tidak diinginkan”, yang kemudian diangkat sebagai judul sebuah berita dan dimuat tanggal 28 Februari 2013. Selebihnya, *Republika* memberitakan anas dan Hambalang pada jarak yang cukup netral, tanpa adanya penyangkutan Partai Demokat dan lembaga-lembaga lain yang pernah disinggahi Anas.

Tabel. 25
Tone Narasumber Berita Anas di Republika

Positif	Negatif	Netral
12	16	10

3. Ratu Atut Chosiyah

a. Koran Tempo

Dalam pemberitaan koran *Tempo*, nama Ratu Atut Chosiyah muncul tiba-tiba pada tanggal 18 Desember 2013, sehari setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus sekaligus, yakni kasus proyek alat kesehatan di Povinsi Banten dan kasus suap kepada ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pada hari Rabu (18/02), *Tempo* sedikitnya menurunkan empat berita terkait, dengan foto Atut di halaman utama dengan judul besar *Dinasti Atut Rontok*.

Sebelumnya, sepekan sebelum penetapan Atut menjadi tersangka, tidak nampak adanya frekuensi berita yang berlebih mengenai Atut di harian *Tempo*. Dalam periode 10-16 Desember 2013, *Tempo* tercatat hanya beberapa hari menerbitkan berita terkait kasus Atut, dengan

frekuensi antara satu hingga dua berita perhari. Sepanjang tanggal 10-16 Desember, *Tempo* memuat empat berita yang diterbitkan pada tanggal 11-13 Desember 2013. Selebihnya, tidak ditemukan berita mengenai Atut.

Selama periode 10-24 Desember 2013, *Koran Tempo* menurunkan 29 berita yang terkait dengan kasus Atut, yang tersebar dalam posisi berita sebagai berikut:

Tabel. 26
Posisi Berita Atut di Koran Tempo

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
4	1	18	6

Sedangkan fokus berita kasus Atut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 27
Fokus Berita Atut di Koran Tempo

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
2	19	0	8

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, intensitas pemberitaan tentang Atut melonjak drastis. Tercatat sejak tanggal 18-24 Desember 2013, *Tempo* menaikkan rata-rata tiga sampai lima berita dalam sehari yang berkaitan dengan kasus Atut. Bisa dikatakan semua berita yang dimuat *Tempo* menyudutkan posisi Atut.

Pada perkembangan selanjutnya, berita *Tempo* semua mengarah pada berbagai kasus Atut dan berbagai konsekwensi hukum yang akan dibebankan pada Atut. Pada beberapa berita, *Tempo* juga menyinggung kaitannya penangkapan Atut dan Partai Golkar. *Tempo* menyebut-nyebut penangkapan Atut sebagai *Benteng Golkar di Pulau Jawa Terancam (19/12/13)*. Sebuah berita lain berjudul *Skandal Atut Hambat Laju Golkar(19/12/13)* juga bernada menyudutkan posisi Golkar dalam kasus Atut.

Berita *Tempo* tentang Atut juga kemudian melebar ke berbagai arah. Sepekan setelah penetapan Atut sebagai tersangka, *Tempo* berangsur-angsur memuat berita yang mengarah pada beberapa kasus, diantaranya Atut menjadi tangan utama yang menyalurkan uang suap kepada Mahkamah Konstitusi.

Selain itu *Tempo* beberapa kali juga mengangkat berita yang berisi menyudutkan semua posisi keluarga Atut, bukan hanya Atut saja. Hal ini nampak pada beberapa judul berita, terutama berita pertama setelah Atut menjadi tersangka yang menyinggung adanya dinasti politik Atut di Banten.

Beberapa berita lain tentang dinasti Atut, dapat pula dilihat di beberapa edisi, yang salah satunya mengangkat judul *Atut Siapkan Putera Sulungnya sebagai Peimpin Dinasti Politik* (22/12/13). Selain itu, berita *Tempo* kemudian juga melebar ke berbagai kemungkinan hukum Atut, termasuk beberapa tuduhan lain seperti pencucian uang.

Di luar proses hukum Atut, berita lain yang juga cukup sering diterbitkan adalah munculnya ketegangan antara Atut dan wakilnya, Rano Karno. Rano Karno beberapa kali diberitakan sebagai orang yang kontra dengan Atut. Salah satu berita juga menyebut-nyebut Rano diancam dijegal oleh loyalis Atut.

Tone pemberitaan kasus Atut di *Koran Tempo* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 28

Tone Beritaan Atut di Koran Tempo

Positif	Negatif	Netral
1	6	22

Sedangkan tone narasumber yang dipilih *Koran Tempo* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 29

Tone Narasumber Berita Atut di Koran Tempo

Positif	Negatif	Netral
7	47	34

b. Kompas

Harian *Kompas*, dalam pemberitaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus alat kesehatan dan suap tanggal 17 Desember 2013, tercatat mengalami pergantian model, dimana sepekan sebelum ditetapkannya Atut sebagai tersangka, berita-berita *Kompas* terkait Atut cukup sedikit. Berita *Kompas* sebelum penetapan Atut, lebih banyak memuat berita tentang Akil

Mochtar, dan sedikit mulai merembet kepada nama Ratu Atut Chosiyah. Sepanjang periode penelitian, ditemukan 10 berita tentang kasus Atut di *Kompas*, dengan penempatan posisi berita sebagai berikut:

Tabel. 30

Posisi Berita Atut di Kompas

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
4	0	6	0

Sementara itu, *Kompas* menurunkan berita kasus Atut dalam berbagai fokus pemberitaan, seperti yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel. 31

Fokus Berita Atut di Kompas

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
6	0	18	7

Frekuensi *Kompas* dalam menurunkan berita Atut mulai naik sejak penetapan Atut menjadi tersangka. Tercatat periode 18-24 Desember 2013, berita Atut di *Kompas* meningkat menjadi satu sampai tiga berita perhari.

Sepanjang ini, *Kompas* tercatat lebih sering menaikkan berita yang cukup netral. Namun demikian, dalam beberapa berita yang dimuat *Kompas* nampak pula beberapa berita yang bernada profokatif dan menyudutkan posisi Atut. Sebagaimana berita tanggal 21 dengan judul *Dinasti Atut Benar-benar Runtuh*, memuat berita yang menyangkutkan beberapa orang dekat dan keluarga Atut ke dalam kasus-kasusnya. Pada tanggal yang sama, *Kompas* juga menempatkan foto Atut di halaman utama dengan judul besar *Atut Menangis Tersedu-sedu*.

Kompas juga sempat menyinggung reaksi Partai Golkar atas penetapan Atut sebagai tersangka. Penyangkutan Golkar pada kasus Atut, antara lain dapat dilihat pada berita *Kompas* edisi 23 Desember 2013 yang berjudul *Golkar Sesalkan Penahanan Atut*. Namun sepanjang ini, tidak nampak adanya penyudutan yang signifikan pada posisi Golkar dalam kasus Atut.

Sepanjang satu pekan sebelum dan sesudah ditetapkannya Atut menjadi tersangka, *Kompas* kemudian juga tidak tercatat menaikkan

frekuensi berita tentang Atut. Pemberitaan Atut dimuat dalam intensitas yang cukup wajar, yakni rata-rata antara satu hingga tiga berita perhari. Dalam beberapa hari *Kompas* juga tercatat tidak menayangkan berita tentang Atut samasekali.

Tone pemberitaan *Kompas* dalam kasus Atut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 32
Tone Beritaan Atut di Kompas

Positif	Negatif	Netral
0	2	8

Sementara tone narasumber yang dipilih *Kompas* dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 33
Tone Narasumber Berita Atut di Kompas

Positif	Negatif	Netral
1	10	10

c. *Republika*

Berita *Republika* terkait kasus korupsi alat kesehatan Provinsi Banten yang menyeret gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, juga memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan koran lain, dimana sebelum ditetapkannya Atut sebagai tersangka pada 17 Desember 2013, tidak ditemukan berita mengenai Atut. *Republika* mulai banyak memuat berita Atut sejak sehari setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus alat kesehatan dan suap kepada ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Sepanjang periode penelitian, ditemukan 13 berita yang berkaitan dengan kasus Atut di *Republika*, dengan sebaran posisi berita sebagai berikut:

Tabel. 34
Posisi Berita Atut di *Republika*

Headline	Subheadline	Berita Biasa	Highlight
4	3	6	0

Selama periode 10-16 Desember 2013, tidak ditemukan pemberitaan Atut di harian *Republika*. Namun pada tanggal 18 Desember 2013, sehari setelah Atut ditetapkan menjadi

tersangka, *Republika* memuat sedikitnya lima berita terkait. Lima berita tersebut diantaranya berjudul *Atut Akan Ditahan; Korupsi di Banten Sudah Merajalela; Fee dan Instruksi yang Menjerat Atut; Citra Kepala Daerah Makin Negatif*, dan; *Ibu tak Terlibat Korupsi Apapun*.

Tabel. 35
Fokus Berita Atut di *Republika*

Latar Belakang	Perkembangan	Kesaksian	Lainnya
1	6	2	4

Dalam semua berita yang dimuat *Republika* tersebut, memiliki kecenderungan yang sedikit menyudutkan posisi Atut sebagai tersangka. Dilihat dari pemberitaan yang dimuat di *Republika*, banyak mengait-ngaitkan antara kasus Atut, termasuk hubungannya dengan Partai Golkar.

Republika banyak memberitakan beberapa gambaran Banten yang disebut-sebut telah menjadi wilayah yang cukup korup, dimana korupsi merajalela di kalangan pejabat pemerintahannya. Hanya saja, pada pemberitaan *Republika* posisi penyudutan terhadap Atut dan Golkar khususnya tidak dinyatakan secara nyata. Berita dan judul yang dimuat *Republika* cenderung samar, seperti berita berjudul *Dana Atut Bisa ke Parpol (19/12/13)*, menunjukkan adanya hubungan antara partai dimana Atut bernaung (Golkar) serta kemana uang Atut bermuara. Dalam berita ini tidak dikatakan secara jelas apakah ada dana dari Atut yang mengalir ke Partai Golkar. Dan hari berikutnya, 20 Desember 2013, Golkar kemudian juga disebut-sebut dalam kasus Atut pada berita yang memuat judul *Kasus Atut Pengaruhi Golkar*. Berita lain sepanjang periode ini mengenai Atut, adalah status Atut dan wakilnya Rano Karno.

Tabel. 36
Tone Beritaan Atut di *Republika*

Positif	Negatif	Netral
2	0	11

Tabel. 37
Tone Narasumber Berita Atut di *Republika*

Positif	Negatif	Netral
7	13	22

H. KESIMPULAN

1. Kasus Luthfi Hasan Ishaq

Dalam kasus Luthfi, ketiga media, baik *Koran Tempo*, *Republika*, maupun *Kompas* hampir tidak memberitakan sebelum penetapan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi. Setelah penetapan, ketiga media mengangkat masalah perkembangan kasus yang merembet pada orang-orang yang dekat dengan Luthfi, terutama para koleganya di PKS, salah satunya Mentan Suswono. Ketiga media juga cenderung memperlebar bahasan mengenai kasus ini, bukan hanya saja dalam proses hukumnya, tetapi juga masuk ke ranah politik. Misalnya dengan pemberitaan mengenai pergantian Luthfi oleh Anis Matta, citra PKS, hingga kepada persoalan pribadi Luthfi.

2. Kasus Anas Urbaningrum

Dalam kasus Anas, ketiga media sudah banyak memberitakan mengenai Anas terkait kasus Hambalang jauh sebelum penetapannya sebagai tersangka. *Tempo* bahkan terkesan mendesak untuk segera menetapkan Anas sebagai tersangka dan setelah itu, melebar bukan hanya dalam kasus Hambalang melainkan ke masalah politik dan kenegaraan. Dari pemilihan diksi dan tone pemberitaan, *Tempo* terlihat cenderung menyudutkan Anas, bahkan seakan menganggap Anas sudah menjadi tersangka sebelum ditetapkan KPK. *Kompas* juga hampir senada dengan *Tempo*, meski banyak juga berita dengan tone yang lebih netral, ditambah dengan pilihan diksi yang lebih halus. Sementara *Republika* meski intensitas pemberitaannya juga tinggi, tidak terlalu tampak menyudutkan posisi Anas, meski juga banyak membahas hal yang tidak terkait langsung dengan persoalan hukumnya, terutama dikaitkan dengan Partai Demokrat dan pemerintah.

3. Kasus Ratu Atut Chosiyah

Dalam kasus Atut, ketiga media lebih gencar memberitakan setelah Atut dijadikan tersangka. Meski demikian, berita tentang Atut sudah banyak muncul sebelumnya. *Tempo*

mengambil sudut pandang pemberitaannya dari masa ‘kejayaan’ Atut hingga menggambarkan nya sebagai ‘keruntuhan’ saat Atut ditangkap dan keluar dari gedung KPK tanpa menggunakan riasan. *Tempo* juga meluaskan pemberitaan kasus ini ke politik di Banten sepeninggal Atut, dan banyak membahas keterlibatan keluarga Atut lainnya, termasuk mengaitkannya dengan kasus-kasus hukum lain. *Kompas* tidak terlalu berbeda, meski jumlah pemberitaannya tidak sebanyak *Tempo*. *Kompas* menyorot kekayaan Atut, kekuasaannya di Banten, juga perkiraan setelah Atut ditahan. *Republika* seperti halnya *Tempo* banyak mengulas tentang ‘kejayaan’ Atut hingga ‘keruntuhannya’, perkembangan kasus, dan keterlibatan Atut dalam kasus lain.

Dalam pemberitaan ketiga media, baik *Koran Tempo*, *Kompas*, maupun *Republika*, pemberitaan ketiga media mengenai ketiga kasus korupsi yang melibatkan tiga petinggi parpol tersebut, jika ditinjau dari tata kerja jurnalistik, terlihat bahwa unsur *prominence* (keterkenalan tokoh) menjadi sajian utama dalam pemberitaan. Jika saja tokoh yang terlibat tidak terkenal, bisa saja pemberitaannya tidak segegap-gempita itu. Tetapi unsur *prominence* ini juga dipadukan dengan daya tarik (*news value*) lain yang tak kalah kuatnya. Misalnya saja, dalam kasus Luthfi, bahkan dibumbui dengan nilai berita *sex* yang justru kontras dengan citra Luthfi yang berasal dari partai berbasis Islam (meski dalam hal ini bukan Luthfi yang disorot, melainkan Ahmad Fathanah pembantunya). Dalam kasus Anas dihubungkan dengan nilai berita *impact and consequence* yang menggambarkan bagaimana dampak besarnya kasus korupsi tersebut, apalagi Anas berasal dari partai penguasa yakni Partai Demokrat. Dan dalam kasus Atut misalnya, dihubungkan dengan nilai berita *magnitude* dimana Atut digambarkan sebagai ‘penguasa’ sebuah provinsi (Banten) yang bukan saja sebagai ‘penguasa’ politik, tapi juga penguasa budaya dan ekonomi.

Penarikan berita politik dengan bauran politik pemberitaan yang disajikan oleh ketiga

media cetak tersebut, wajar dalam sebuah tata kerja jurnalistik, dimana sebuah media tidak bisa dilepaskan dari politik pemberitaan. Akan tetapi, akan sangat berbahaya jika politik pemberitaan ini juga berkaitan dengan maksud politik tertentu. Untungnya, secara kasat mata, sulit melihat ketiga media ini memiliki agenda politik tertentu, apalagi kepemilikan media ketiganya tidak berkaitan dengan partai atau petinggi partai politik tertentu.

Dalam konteks konstruksi realitas media, ketiga media bisa dinilai telah menyajikan sebuah konstruksi yang baik tentang bahaya kasus korupsi yang melibatkan para petinggi parpol yang juga petinggi negara. Tentu saja, sepanjang konstruksi tersebut tidak diarahkan pada tujuan politis tertentu yang justru merugikan khalayak. Hal yang patut diwaspadai dari konstruksi sebuah realitas yang disajikan media adalah, ketika realitas yang terkait dengan citra seseorang, seringkali digunakan untuk membuat *judgement* terhadap orang yang diberitakan, padahal, ranah ini bukanlah ranah politik, melainkan ranah hukum, sementara proses hukum ketiga petinggi parpol tersebut masih terus berjalan dan belum menghasilkan keputusan final. Jangan sampai, tujuan baik media untuk berperan dalam pemberantasan korupsi, justru menghasilkan realitas sampingan yang buruk, misalnya pembunuhan karakter seseorang, yang secara hukum formal bahkan belum memiliki putusan tetap. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Curran, James. (2002). *Media and Power*. London. Routledge.
- Ecip, S. Sinansari (2007), *Jurnalistik Mutakhir, Panduan dari Atas Meja*, Jakarta. Penerbit Republika.
- Kriyantono. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi*, Jakarta : Kencana
- Liliweri, Alo (2011), *Komunikasi, Serba Ada Serba Makna*. Jakarta. Kencana.
- McQuail, Denis (2011), *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi 6 buku 1 & 2, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Miller, Katherine (2005), *Communications Theory: Perspectives, Processes, and Contexts*, Boston, McGraw-Hill
- Wimmer and Dominick (2006). *Mass Media Research*, ThomsonWadsworth, USA